

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENETAPAN *FEE* AUDIT EKSTERNAL PADA
PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika Dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

NADIA RIZKI NUGRAHANI

NIM. C2C 009 199

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2013

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Nadia Rizki Nugrahani

Nomor Induk Mahasiswa : C2C009199

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PENETAPAN *FEE*
AUDIT EKSTERNAL PADA PERUSAHAAN
YANG TERDAFTAR DI BEI**

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Arifin S., M.Com. Hons., Akt.

Semarang, 18 Januari 2013

Dosen Pembimbing

(Prof. Dr. H. Arifin S., M.Com. Hons., Akt.)

NIP: 196 00909 198 703 1023

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Nadia Rizki Nugrahani

Nomor Induk Mahasiswa : C2C009199

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PENETAPAN *FEE*
AUDIT EKSTERNAL PADA PERUSAHAAN
YANG TERDAFTAR DI BEI**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 27 Februari 2013

Tim Penguji

1. Prof. Dr. H. Arifin Sabeni., M.Com., Hons., Akt.(.....)
2. Faisal, M. Si., Ph. D (.....)
3. Aditya Septiani., S.E., M.Si., Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Nadia Rizki Nugrahani, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan *Fee Audit Eksternal* pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 18 Januari 2013

Yang membuat pernyataan,

(Nadia Rizki Nugrahani)

NIM : C2C009199

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”
(Q.S. Al-Insyirah : 5-8)

*Es ist gut, wenn du ein wichtiger Mensch wird, aber es ist wichtiger, wenn du ein
gutter Mensch ist...*

Lebih baik jika kamu menjadi orang penting. Tetapi lebih penting jika kamu
menjadi orang yang baik...
(Ibu Herdina Hutabarat)

Happiness does not lie in happiness, but in the achievement of it – nadia

Hati adalah kunci dari seluruh tujuan, ketika menginginkan sesuatu maka bukanlah
hatimu dulu, kemudian niatkan untuk bergerak, karena niat berasal dari hati, dan
niat yang menggerakkan badanmu – chalendra

*Skripsi ini kupersembahkan kepada Ibu Amining Sri Redjeki, Bapak Budi Santoso, dan
Dwina Riski Anindhita (keluargaku, hidupku...) dan orang-orang yang kusayangi atas
segala pengorbanan yang tidak mungkin terbalas,
semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik,*

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine factors that can affect the determination of external audit fees on all companies listed on Bursa Efek Indonesia (BEI). Factors expected to affect external audit fees determination are internal audit, corporate governance, the characteristics of auditors (BIG4), firm size, and subsidiaries. These factors are expected to reduce existing risk, so low external audit fees can be achieved.

This study is a modification of Herjinder's et al. (2010). This study is modified by adding several other independent variables and uses secondary data from annual reports of all companies which listed on Bursa Efek Indonesia (BEI) in 2009-2011. This study uses purposive sampling method and uses multiple linear regression as the analysis instrument. Before being conducted the regression test, it is examined by using the classical assumption tests.

The results of this study indicate that internal audit, the independence of the board commissioner, the meeting intensity of the board commissioner, independency of the audit committee, and the meeting intensity of the audit committee does not has significant influence with external audit fees. The size of the board commissioner, the size of the audit committee, characteristics of the auditor (BIG4), firm size and subsidiaries have significant relationship on the external audit fees. This study indicate that the size of the board commissioner and audit committee will demand a high quality audit from external auditors, resulting in higher audit fees. Mean while characteristics of auditors (BIG4), firm size, and subsidiaries that have high complexity will lead to higher audit fees.

Keywords : internal audit, corporate governance, characteristics of auditors (BIG4), firm size, subsidiaries, audit fees.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penetapan *fee* audit eksternal pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi penetapan *fee* audit eksternal adalah internal audit, *corporate governance*, karakteristik auditor (BIG4), ukuran perusahaan, dan anak perusahaan. Faktor-faktor tersebut diharapkan dapat mengurangi resiko, sehingga *fee* audit eksternal yang rendah dapat dicapai.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Herjinder *et al.* (2010). Penelitian ini dimodifikasi dengan menambahkan beberapa variabel independen lainnya dan menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan tahunan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009-2011. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Sebelum dilakukan uji regresi, data terlebih dahulu diuji menggunakan uji asumsi klasik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa internal audit, independensi dewan komisaris, jumlah pertemuan dewan komisaris, independensi komite audit, dan jumlah pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap *fee* audit. Ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, karakteristik auditor (BIG4), ukuran perusahaan, dan anak perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *fee* audit. Penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dan komite audit akan menuntut kualitas audit yang tinggi dari auditor eksternal, sehingga menyebabkan *fee* audit semakin tinggi. Sedangkan karakteristik auditor (BIG4), ukuran perusahaan, dan anak perusahaan yang memiliki kompleksitas yang tinggi akan menyebabkan *fee* audit yang tinggi pula.

Kata kunci : internal audit, *corporate governance*, karakteristik auditor (BIG4), ukuran perusahaan, anak perusahaan, *fee* audit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT untuk segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan kuliah Program Sarjana di Program Studi Akuntansi Universitas Diponegoro dan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang begitu mendalam untuk :

1. Bapak Prof. Dr. Arifin, M.Com., Hons., Akt. selaku dosen pembimbing skripsi untuk ilmu pengetahuan yang ditularkan, perhatian, dan kesabaran dalam memberikan bimbingan dan koreksi kepada Penulis.
2. Bapak Faisal M.Si., Ph.D dan Ibu Aditya Septiani., S.E., M.Si., Akt untuk koreksi dan masukan yang berharga ketika menjadi penguji dalam sidang akhir skripsi.
3. Bapak Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, Msi., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
4. Bapak Dr. M. Syafruddin MSi., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang turut memberikan dorongan secara tidak langsung bagi Penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Siti Mutmainah, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen wali Penulis yang telah memberikan perhatian dan bimbingan selama Penulis menjalani proses belajar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
6. Seluruh staf Pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah membagi ilmu pengetahuan kepada Penulis.
7. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah membantu kelancaran proses administrasi.
8. Segenap keluarga Penulis yang telah memberikan doa, cinta, dan dukungan yang tidak ada habisnya, terutama untuk Ibu, Ibu, Ibu, Bapak, dan Winot yang terus menemani baik dalam suka maupun duka.

9. Putri, Bonita, Ulil, Yuli, Icha dan Heni sahabat sekaligus teman “Gila” yang selalu menghibur dan senantiasa memberikan dukungan bagi Penulis. *You’re always be my second family* ☺
10. Chalendra Prasetya Agusti, sebagai orang terdekat, teman, sahabat sekaligus kakak yang senantiasa memberikan dukungan serta doa. Terimakasih atas semua kebahagiaan, bantuan, dan doanya sampai saat ini.
11. Seluruh sahabat Penulis untuk doa dan dukungan yang diberikan (khususnya untuk Yashinta Pradyamitha Cendy, Arlita Marcela Sudiby, Fatkhur Haris Irfan, dan Alm. Raisha Iftika Khairina). *My bfs ever!*
12. Teman-teman sepermainan dan tempat berdiskusi segala hal selama tiga tahun ini (Mbak Arin, Tyas, Ocir, Adi, Denny, Belva, Handoko, Mas Riza, Disty). Terimakasih atas segala tawa, canda dan hiburan yang kalian berikan.
13. Teman-teman seperjuangan (Arlita Marcela Sudiby dan Chalendra Prasetya Agusti) yang telah memberi masukan, bantuan, dan dukungan.
14. Keluarga besar SMA Negeri I Serang terutama untuk keluargaku RPM 2nd Generation, teruntuk Ibu Herdina Hutabarat yang mengajarkan apa itu perjuangan, perjuangan yang sesungguhnya...
15. Segenap teman-teman Akuntansi Program Reguler II Angkatan 2009 yang telah memberikan banyak pengalaman yang indah, semangat, bantuan, dan dukungan.
16. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat Penulis sebut satu per satu.

Akhir kata dengan segala keterbukaan, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semarang, 18 Januari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Manfaat Penelitian	9
1.3.2.1 Manfaat Praktis	9
1.3.2.2 Manfaat Teoritis	10
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II TELAAH PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	12
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	12
2.1.2 Pengendalian Internal	15
2.1.2.1 Definisi Pengendalian Internal	15
2.1.2.2 Manfaat Pengendalian Internal	16
2.1.3 <i>Corporate Governance</i>	17
2.1.3.1 Definisi <i>Corporate Governance</i>	17
2.1.3.2 Prinsip-Prinsip <i>Corporate Governance</i>	19

2.1.3.3 Manfaat <i>Corporate Governance</i>	22
2.1.3.4 Struktur <i>Corporate Governance</i>	22
2.1.3.4.1 Dewan Komisaris dan Dewan Direksi	23
2.1.3.4.2 Komite Audit	27
2.1.3.5 Eksternal Auditor	28
2.1.4 Karakteristik Auditor	29
2.1.5 Ukuran Perusahaan	30
2.1.6 Anak Perusahaan	31
2.1.7 <i>Fee</i> Audit	32
2.1.8 Penelitian Terdahulu	34
2.2 Posisi Penelitian	37
2.3 Kerangka Pemikiran	38
2.3.1 Hubungan Antara Pengendalian Internal dan <i>Fee</i> Audit.....	38
2.3.2 Hubungan Antara Struktur <i>Corporate Governance</i> dan <i>Fee</i> Audit ...	38
2.3.3 Hubungan Antara Karakteristik Auditor dan <i>Fee</i> Audit	39
2.3.4 Hubungan Antara Ukuran Perusahaan dan <i>Fee</i> Audit	39
2.3.5 Hubungan Antara Jumlah Anak Perusahaan dan <i>Fee</i> Audit	40
2.4 Hipotesis	42
BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	52
3.1.1 Variabel Dependen	52
3.1.2 Variabel Independen	53
3.1.2.1 Internal Audit.....	53
3.1.2.2 Komisaris Independen.....	53
3.1.2.3 Komite Audit	54
3.1.2.4 Karakteristik Auditor.....	54
3.1.2.5 Ukuran Perusahaan.....	56
3.1.2.6 Anak Perusahaan.....	56
3.1.3 Variabel Kontrol	57
3.1.3.1 Rasio Utang atas Aset Perusahaan.....	57
3.1.3.2 <i>Return of Assets</i>	58

3.1.3.3 Rasio Persediaan dan Piutang atas Aset Perusahaan.....	59
3.2 Populasi dan Sampel	59
3.3 Jenis dan Sumber Data	60
3.4 Metode Pengumpulan Data	61
3.5 Metode Analisis	61
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	61
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	61
3.5.3 Pengujian Hipotesis	65
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	68
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	68
4.2 Analisis Data	69
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif	69
4.2.2 Hasil Pengujian Asumsi Klasik	73
4.2.2.1 Uji Normalitas.....	73
4.2.2.2 Uji Multikolinieritas	75
4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas	77
4.2.2.4 Uji Autokorelasi.....	79
4.2.3 Pengujian Hipotesis	80
4.2.3.1 Koefisien Determinasi (R^2)	80
4.2.3.2 Uji F.....	81
4.2.3.3 Uji t.....	82
4.3 Interpretasi Hasil	84
BAB V PENUTUP	97
5.1 Kesimpulan	97
5.2 Keterbatasan	100
5.3 Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	106

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Distribusi Sampel Penelitian.....	68
Tabel 4.2 Analisis Statistik Deskriptif Tahun 2009-2011	69
Tabel 4.3 Analisis Statistik Deskriptif Persentase Variabel BIG4	70
Tabel 4.4 Analisis Statistik Deskriptif Persentase VARIabel SUBSIDRS	70
Tabel 4.5 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	75
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas	76
Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas (<i>Glejser</i>)	78
Tabel 4.8 Hasil Uji <i>Run Test</i>	79
Tabel 4.9 Hasil Uji Determinasi	80
Tabel 4.10 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	81
Tabel 4.11 Uji Signifikansi Parameter Individual / Partial (Uji t)	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam Two Tiers System yang diadopsi oleh Indonesia.....	25
Gambar 2.2 Kerangka Penelitian	41
Gambar 4.1 Hasil Uji P-Plot of Regression Standardized Residual	74
Gambar 4.2 Uji Heterokedastisitas	77

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A Hasil Statistik Deskriptif	107
LAMPIRAN B Hasil Uji Normalitas	108
LAMPIRAN C Hasil Uji Multikolonieritas	110
LAMPIRAN D Hasil Uji Heterokedastisitas	113
LAMPIRAN E Hasil Uji Autokorelasi	114
LAMPIRAN F Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²)	115
LAMPIRAN G Hasil Uji Statistik F (Simultan)	116
LAMPIRAN H Hasil Uji Statistik t (Partial)	117

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan bisnis perusahaan dapat digambarkan dengan teori agensi yang menjelaskan hubungan keagenan yaitu suatu kontrak yang terjadi antara prinsipal dan agen. Prinsip utama teori keagenan ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*) yaitu manajer. Prinsipal merupakan partisipan-partisipan yang berkontribusi dalam pemberian modal (*stakeholders*), sedangkan agen merupakan partisipan-partisipan yang berkontribusi dalam keahlian dan tenaga kerja (*management*). Inti dari hubungan keagenan adalah pemisahan antara kepemilikan (*principal*) dan pengendalian (*agent*). Prinsipal mempunyai harapan bahwa dengan mendelegasikan wewenang pengelolaan tersebut, mereka akan memperoleh keuntungan dengan bertambahnya kekayaan investor (Jensen dan Meckling, 1976).

Hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah pada saat pihak-pihak yang berhubungan memiliki tujuan yang berbeda. Prinsipal sebagai pemilik modal menghendaki penambahan kekayaan dan kemakmuran para pemilik modal, sedangkan manajer sebagai agen juga menginginkan peningkatan kesejahteraan bagi para manajer. Dengan demikian muncul konflik kepentingan antara investor (*principal*) dengan manajer (*agent*). Pemilik lebih berusaha untuk

memaksimalkan *return* dan harga sekuritas dari investasi, sedangkan manajer mempunyai kebutuhan psikologis dan ekonomi yang luas, termasuk memaksimalkan kompensasi (Darmawati *et al.* 2005).

Kontrak yang dibuat antara pemilik (*principal*) dengan manajer (*agent*) diharapkan dapat meminimumkan konflik antar kedua kepentingan tersebut. Alijoyo dan Zaini (2004) menjelaskan bahwa pemisahan fungsi eksekutif dan fungsi pengawasan pada teori keagenan menciptakan “pengawasan dan pengendalian (*checks and balances*)”, sehingga terjadi independensi yang sehat bagi para manajer untuk menghasilkan kinerja perusahaan yang maksimum dan *return* yang memadai.

Ada empat mekanisme *corporate governance* yang sering dipakai dalam berbagai penelitian mengenai *corporate governance* yang bertujuan untuk mengurangi konflik keagenan, yaitu komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Komposisi dewan komisaris merupakan salah satu karakteristik dewan yang berhubungan dengan kandungan informasi laba. Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas (Boediono, 2005).

Terdapat tiga elemen penting yang akan mempengaruhi tingkat efektivitas dewan komisaris, yaitu independensi, kompetensi, dan komitmen. Independensi diharapkan timbul dengan keberadaan komisaris independen. Kompetensi tercipta dengan adanya komite-komite yang dibentuk dewan

komisaris, terutama komite audit. Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih obyektif dan independen, dan juga untuk menjaga "fairness" serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, bahkan kepentingan para stakeholder lainnya (Boediono, 2005). Menurut Sharma dalam Widiyanti (2009) eksternal auditor dan keberadaan dewan independen akan menjadikan pengendalian internal lebih kuat dan risiko salah saji laporan keuangan yang lebih rendah. Pengendalian internal yang baik akan menyebabkan eksternal auditor mengurangi ruang lingkup pemeriksaan audit, yang pada akhirnya akan mempengaruhi proses penentuan *fee* audit.

Auditor internal perusahaan dan komite audit perusahaan merupakan salah satu bagian vital dalam pembuatan laporan keuangan. Pihak-pihak tersebut seharusnya memiliki pemahaman yang sama tentang peranan masing-masing unit yang dijalankan sehingga pelaksanaan *corporate governance* dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dari sisi permintaan, kehadiran komite audit memiliki hubungan yang positif dengan *fee* audit karena komite audit memastikan bahwa lama proses audit tidak akan dikurangi sampai pada tingkat kualitas audit yang diinginkan (Cadbury Committee, 1992). Dari sisi penawaran, keterlibatan komite audit dalam memperkuat pengendalian internal yang menuntun auditor eksternal mengurangi penilaian dari risiko pengendalian, menghasilkan uji substantif yang lebih sedikit, dan *fee* audit yang lebih rendah (Collier dan Gregory, 1996 dalam Goodwin-Stewart, 2006).

Diacon (2002) menyatakan bahwa kantor akuntan publik juga berpengaruh terhadap besarnya *fee* audit yang akan diberikan. Kantor Akuntan Publik dapat menjadi salah satu bagian dari *auditor karacteristic*. Kantor Akuntan Publik yang besar dan termasuk dalam jajaran (Big 4) akan lebih terlihat menunjukkan kemampuannya dalam melakukan proses audit eksternal. Kantor akuntan publik yang memiliki nama besar (Big 4) memiliki citra sebagai auditor yang akan menghasilkan tingkat kualitas audit yang melebihi persyaratan minimal keprofesionalan dan kualitas dari Kantor Akuntan Publik yang tidak memiliki nama besar. Kantor Akuntan Publik atau Auditor yang berkualitas tinggi membuat sedikit kesalahan daripada auditor yang berkualitas rendah sehingga memiliki *fee* audit yang lebih tinggi dari auditor yang berkualitas rendah (Diacon, 2002).

Ukuran perusahaan (*size*) merupakan besar kecilnya ukuran perusahaan yang sedang diaudit oleh auditor atau Kantor Akuntan Publik (Crasswell *et al.* dalam Halim 2005). Menurut Beams (2000), perusahaan yang memiliki jumlah anak perusahaan yang banyak di dalam negeri maka transaksi yang dilakukan perusahaan tersebut akan semakin rumit karena perlu membuat laporan konsolidasi. Sedangkan perusahaan yang memiliki anak perusahaan diluar negeri juga akan memiliki transaksi yang semakin rumit karena perlu membuat laporan *remeasurement* dan atau membuat laporan *translasi*. Setelah membuat laporan *remeasurement* dan atau membuat laporan *translasi* kemudian barulah perusahaan tersebut menyusun laporan konsolidasi. Jumlah anak perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mempengaruhi besar penetapan *fee* audit eksternalnya.

Penelitian ini akan meneliti beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi besar penetapan *fee* audit eksternal pada sebuah perusahaan. Dalam berbagai penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Carcello *et al.* (2002) yang menggunakan data dari Amerika Serikat pada awal tahun 1990, menemukan bahwa terdapat hubungan antara karakteristik komite audit dengan *fee* audit yang lebih tinggi. Keberadaan komite audit dan berbagai mekanisme pengendalian lainnya dihubungkan dengan *fee* audit yang tinggi dan kualitas audit yang baik harus meningkatkan kualitas laporan keuangan serta dapat mengurangi risiko auditor dalam pemberian opini audit. Demikian pula penelitian Yatim *et al.* (2006) dan Sharma dalam Widiyanti (2009) yang menemukan adanya pengaruh positif yang signifikan antara struktur *corporate governance* seperti independensi dewan komisaris, komite audit, dan frekuensi pertemuan komite audit terhadap besarnya penetapan *fee* audit eksternal.

Goodwin-Stewart *et al.* (2006) dalam penelitiannya menguji pengaruh antara *fee* audit, audit internal suatu perusahaan serta tata kelola perusahaannya. Dengan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Australia pada tahun 2000, ditemukan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara *fee* audit dan *internal audit*. Goodwin-Stewart *et al.* (2006) mempelajari bahwa hubungan antara *fee* audit dan fungsi pengendalian internal akan lebih tinggi apabila perusahaan melaksanakan audit internal. Lebih lanjut studi tersebut menyatakan bahwa audit internal maupun eksternal akan meningkatkan keseluruhan pengawasan yang ada dalam perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan peranan luas audit internal yang telah berkembang dari pengendalian yang dangkal menjadi

lingkup manajemen risiko dan *corporate governance*. Selain itu Goodwin-Stewart *et al.* (2006) menyatakan bahwa *fee* audit yang tinggi menyatakan kualitas audit yang baik.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Harjinder *et al.* (2010) yang merupakan perluasan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Goodwin-Stewart *et al.* (2006). Pemeriksaan hubungan antara audit internal dan *fee* audit penting mengingat fokus saat ini pada kuatnya praktik *corporate governance* dan struktur mekanismenya. Setidaknya, manajemen harus peduli bagaimana audit internal dan audit eksternal meningkatkan integritas laporan keuangan (Goodwin-Stewart dan Kent, 2006; Leptospira dan Page, 2003).

Harjinder *et al.* (2010) menggunakan data tahun 2005 yang terkumpul hanya dari laporan tahunan (yaitu informasi publik). Dengan sampel 300 perusahaan publik di Australia, penelitian ini menguji pengaruh *internal audit*, *corporate governance*, dan *auditor characteristic* terhadap penentuan harga pelayanan audit (*fee* audit). Ditemukan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara *internal audit*, *corporate governance*, *auditor characteristic* dan *fee* audit.

Penelitian Harjinder *et al.* penting baik bagi pelaksanaan *corporate governance* dan bagi internal audit perusahaan, terutama mengingat banyaknya (dan terakhir) perusahaan yang runtuh di Australia yang telah menyoroti masalah dengan kualitas pelaporan keuangan dan dengan praktek audit. Penelitian ini menyoroti apakah Perusahaan Australia yang terdaftar terus memilih untuk melengkapi fungsi audit eksternal mereka dengan kehadiran audit internal.

Kemungkinan besar dalam upaya untuk meningkatkan keseluruhan kekuatan kontrol perusahaan atau pemantauan lingkungan. Dan yang paling penting apakah komitmen dari perusahaan dapat ditentukan murni dari informasi publik.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terdapat beberapa faktor yang diperkirakan mempengaruhi besarnya *fee* audit. Maka penelitian ini diberi judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENETAPAN *FEE* AUDIT EKSTERNAL PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini memperluas penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan menguji faktor apa saja yang mempengaruhi besar penetapan *fee* audit eksternal di negara berkembang seperti Indonesia. Terdapat dua faktor yang menyebabkan hal tersebut menarik untuk diteliti kembali. Pertama, masih terdapat hasil yang berbeda antara penelitian satu dengan yang lainnya. Selain itu hasil empiris memberikan bukti dari lingkungan pasar modal yang kuat (Carcello *et al*, 2002 (US); Goodwin-Stewart *et al*, 2006 (Australia)). Sangat sedikit penelitian yang telah dilakukan di negara dimana pasar modalnya masih terus berkembang seperti di Indonesia.

Kedua, karena pengungkapan *fee* audit dalam laporan tahunan masih berupa *voluntary disclosures* maka data tentang *fee* audit merupakan data yang eksklusif dan sulit didapatkan. Pada penelitian-penelitian sebelumnya, data

tentang *fee* audit diwakili oleh besarnya *professional fees*. Sehingga masih jarang penelitian yang mengambil tema tentang *fee* audit eksternal.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bermaksud menguji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penetapan *fee* audit eksternal. Maka secara spesifik pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *internal audit* mempunyai pengaruh terhadap penetapan *fee* audit eksternal?
2. Apakah struktur *corporate governance* yang terdiri dari independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, intensitas pertemuan dewan komisaris, independensi komite audit, ukuran komite audit, dan intensitas pertemuan komite audit mempunyai pengaruh terhadap *fee* audit eksternal?
3. Apakah *Auditor Characteristic* (Kantor Akuntan Publik) mempunyai pengaruh terhadap penetapan *fee* audit eksternal?
4. Apakah ukuran perusahaan (*Size*) mempunyai pengaruh terhadap *fee* audit eksternal?
5. Apakah adanya anak perusahaan mempunyai pengaruh terhadap *fee* audit eksternal?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan dari penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis secara empiris :

1. Pengaruh *internal audit* terhadap *fee* audit eksternal.

- 2 Pengaruh proporsi independensi dewan komisaris terhadap *fee* audit eksternal.
- 3 Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *fee* audit eksternal.
- 4 Pengaruh intensitas pertemuan dewan komisaris terhadap *fee* audit eksternal.
- 5 Pengaruh proporsi independensi komite audit terhadap *fee* audit eksternal.
- 6 Pengaruh ukuran komite audit terhadap *fee* audit eksternal.
- 7 Pengaruh intensitas pertemuan komite audit terhadap *fee* audit eksternal.
- 8 Pengaruh *auditor characteristic* (Kantor Akuntan Publik) terhadap *fee* audit eksternal.
- 9 Pengaruh ukuran perusahaan (*size*) terhadap *fee* audit eksternal.
- 10 Pengaruh adanya anak perusahaan terhadap *fee* audit eksternal.

1.3.2 Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.2.1 Manfaat Praktis :

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa bukti empiris mengenai faktor-faktor apa saja (internal audit, *corporate governance*, karakteristik auditor, ukuran perusahaan, dan anak perusahaan) yang mempunyai pengaruh terhadap besar penetapan *fee* audit eksternal.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pihak perusahaan mengenai pentingnya penerapan *good corporate governance*. Dengan penerapan *good corporate governance* diharapkan dapat

memberi pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan yang tercermin dari menurunnya tingkat rekayasa yang dilakukan manajemen. Selain itu penerapan *good corporate governance* diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders*.

1.3.2.2 Manfaat Teoritis :

1. Penelitian ini diharapkan dapat mengklarifikasikan hasil penelitian sebelumnya, dan untuk penelitian selanjutnya kekurangan dalam penelitian ini dapat memberikan kesempurnaan dalam penelitian yang sejenis.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang permasalahan yang dipilih dalam penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai bahan yang melandasi tulisan ini, sehingga dapat mendukung penelitian yang akan dilaksanakan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memberikan deskripsi tentang definisi operasional dan variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang dikumpulkan, metode pengumpulan data, dan metode analisisnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan tentang deskripsi obyek penelitian yang terdiri dari gambaran umum sampel dan hasil olah data serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Merupakan simpulan penelitian, keterbatasan serta saran bagi penelitian mendatang.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori ini menjelaskan hubungan keagenan antara dua pihak dimana satu pihak tertentu (*principal*) mempekerjakan pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan jasa atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian wewenang pembuatan keputusan kepada agen (Jensen dan Meckling, 1976). Teori agensi dilandasi oleh tiga asumsi sifat dasar manusia yaitu *pertama*, sifat manusia yang pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*); *kedua*, sifat manusia yang memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*); dan *ketiga*, sifat manusia yang lebih memilih untuk menghindari risiko (*risk averse*) (Eisenhardt, 1989).

Teori keagenan digunakan untuk menyelesaikan dua permasalahan (Eisenhardt, 1989) yaitu pertama, masalah keagenan yang timbul pada saat (a) keinginan-keinginan atau tujuan dari prinsipal dan agen bertentangan dan (b) merupakan suatu hal yang sulit atau mahal bagi prinsipal untuk melakukan verifikasi tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh agen. Permasalahannya adalah prinsipal tidak dapat memverifikasi apakah agen telah melakukan tugasnya secara tepat. Kedua, adalah masalah pembagian risiko yang timbul pada saat prinsipal dan agen mungkin memiliki preferensi tindakan yang berbeda yang dikarenakan adanya perbedaan preferensi terhadap risiko.

Manajer seringkali lebih cenderung berfokus untuk mengejar kepentingan pribadinya dan sudah tidak berdasar atas maksimasi nilai dalam pengambilan keputusan pendanaan (Jensen dan Meckling, 1976). Hal inilah yang kemudian menimbulkan konflik keagenan. Masalah yang berkaitan dengan perbedaan kepentingan dalam hal pengambilan keputusan pendanaan salah satunya dikarenakan para pemegang saham hanya peduli terhadap risiko sistematis dari saham perusahaan, karena mereka akan melakukan investasi pada portofolio yang terdiversifikasi dengan baik. Sementara para manajer lebih peduli pada risiko perusahaan secara keseluruhan.

Masalah keagenan dapat terjadi karena adanya *asymmetric information* antara pemilik dan manajer. *Asymmetric information* timbul ketika salah satu pihak memiliki informasi yang tidak dimiliki oleh pihak lainnya. *Asymmetric information* terdiri dari dua tipe, yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. Pada tipe *adverse selection*, salah satu pihak merasa memiliki informasi yang lebih sedikit dibandingkan pihak lain. Pihak tersebut tidak akan mau melakukan perjanjian dan akan membatasi dengan kondisi yang sangat ketat serta biaya yang sangat tinggi. Sementara *Moral hazard* terjadi apabila manajer melakukan tindakan tanpa sepengetahuan pemilik untuk keuntungan pribadinya dan mengakibatkan penurunan kesejahteraan pemilik (Jensen dan Meckling, 1976).

Menurut Fama dan Jensen (1983) teori keagenan memiliki peran penting dalam hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Sering kali terdapat masalah agensi dalam hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan tersebut, dan masalah agensi yang menjadi perhatian penting

adalah proses pengambilan keputusan dimana terdapat pemisahan antara fungsi kepemilikan dan pengawasan dalam perusahaan. Pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada teori keagenan dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan baik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. *The Cadbury Committee* (1992) menyatakan bahwa adanya perbedaan kepentingan dalam perusahaan menimbulkan *corporate governance* yang dinyatakan sebagai sistem pengelolaan dan pengendalian perusahaan.

Mekanisme yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah keagenan atau perbedaan kepentingan adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). *Good Corporate Governance* adalah bentuk pengelolaan perusahaan, dimana didalamnya tercakup suatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan kreditur sebagai penyandang dana ekstern. Sistem *corporate governance* yang baik akan memberikan perlindungan yang efektif kepada para pemegang saham dan kreditur untuk memperoleh kembali investasi dengan wajar, tepat, dan seefisien mungkin, serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik mungkin untuk kepentingan perusahaan (*The Cadbury Committee*, 1992).

Target kontrol *corporate governance* adalah kontrol terhadap perusahaan yang diarahkan pada pengawasan perilaku manajer. Kontrol tidak diarahkan pada pengekanan kreatifitas dan potensi manajemen, tetapi lebih diarahkan pada upaya mengarahkan pengelolaan perusahaan yang terbuka (*transparant*) dan yang bisa dipertanggungjawabkan (*accountable*) serta terdapat proses *monitoring*.

2.1.2 Pengendalian Internal

2.1.2.1 Definisi Pengendalian Internal

Standar Proposional Akuntan Publik pada SA 319 par 6 mengungkapkan bahwa Struktur Pengendalian Internal merupakan kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memberikan keyakinan (assurance) yang memadai bahwa tujuan tertentu satuan usaha akan dicapai.

Menurut IAI (2001) :

“Struktur Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.

Menurut COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission*) :

“Struktur pengendalian internal satuan usaha terdiri atas : (1) lingkungan pengendalian, (2) penaksiran resiko, (3) informasi dan komunikasi, (4) aktivitas pengendalian, dan (5) pemantauan”.

Begitu juga menurut IAI (2001) :

“Bahwa pengendalian internal satuan usaha terdiri atas (1) lingkungan pengendalian, (2) penaksiran risiko, (3) aktivitas pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan”.

The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO) pada tahun 1992 menjelaskan rerangka pengendalian yang dapat memperkuat pengendalian internal dalam perusahaan yang terdiri dari lima komponen yang saling terkait, yaitu :

- a. Lingkungan pengendalian (*control environment*) yang menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian pihak-pihak yang ada di dalamnya.
- b. Penaksiran risiko (*risk assessment*) merupakan identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya dan membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.
- c. Standar pengendalian (*control activities*) merupakan kebijakan dari prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.
- d. Informasi dan komunikasi (*information dan communication*) merupakan pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk waktu yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk melaksanakan tanggung jawab mereka.
- e. Pemantauan (*monitoring*) merupakan proses menentukan mutu kinerja pengendalian internal sepanjang waktu.

2.1.2.2 Manfaat Pengendalian Internal

Halim (2005) mengemukakan manfaat dan pentingnya pengendalian internal, antara lain :

- a. Lingkup dan ukuran entitas bisnis yang semakin kompleks.
- b. Pemeriksaan dalam sistem yang baik memberikan perlindungan terhadap kelemahan dan mengurangi kemungkinan kekeliruan yang terjadi.
- c. Pengendalian internal yang baik akan mengurangi beban pelaksanaan audit sehingga dapat mengurangi biaya ataupun *fee* audit.

Dengan keberadaan fungsi internal audit yang efektif, dapat menciptakan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada dalam perusahaan telah digunakan secara ekonomis, efektif dan efisien. Pengendalian yang ada dalam perusahaan dapat memberikan kepastian lebih tinggi bahwa informasi yang dihasilkan tersebut dapat dipercaya (Mulyadi, 2002).

Internal audit juga dapat menjadi barometer standar perilaku yang berlaku di perusahaan melalui aktivitas pengawasan yang dilakukan secara berkesinambungan, yang mendorong terwujudnya iklim kerja yang efisien. dengan perbaikan dalam proses internal tersebut, keyakinan investor dan kreditur terhadap pengelolaan perusahaan juga akan meningkat.

2.1.3 Corporate Governance

2.1.3.1 Definisi *Corporate Governance*

Perwujudan *good corporate governance* dimulai dengan penjelasan struktur *governance*. *Governance* berasal dari kata *gubernare* yang berarti *to steer*, mengendalikan dan memberi arahan layaknya seorang nahkoda kapal. Dengan kata lain, siapapun yang menjadi pelaku dalam struktur *governance* adalah seseorang atau badan yang mampu memberikan arahan dan mengendalikan perusahaan agar tetap dapat dikelola berdasarkan visi dan misi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Ikatan Komite Audit Indonesia, 2006).

Berdasarkan definisi oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* yang sesuai dengan definisi *Cadbury Committee*, *corporate governance* didefinisikan sebagai “Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara

pemegang saham, pengurus (pengelola), pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain *corporate governance* merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan”.

Menurut Komisi Nasional GCG Indonesia, *good corporate governance* merupakan pola hubungan, sistem, serta proses yang digunakan perusahaan baik direksi maupun komisaris yang berguna untuk memberi nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya. Pola hubungan, sistem, serta proses yang digunakan oleh organ perusahaan itu berjalan berdasarkan lima prinsip, yaitu transparansi, independensi, *fairness*, akuntabilitas dan tanggung jawab.

Dari beberapa pengertian di atas, beberapa aspek penting dari *corporate governance* meliputi :

- a. Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan, diantaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komisaris dan direksi, yang berhubungan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut (keseimbangan internal).
- b. Adanya pelaksanaan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholders*, yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan *stakeholders* (keseimbangan eksternal).

- c. Adanya hak-hak yang diberikan kepada pemegang saham untuk memperoleh informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan dan hak berperan dalam perusahaan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perkembangan strategis dan perubahan mendasar atas perusahaan serta ikut menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pertumbuhannya.
- d. Adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing melalui keterbukaan informasi yang material dan relevan serta melarang penyampaian informasi untuk pihak sendiri yang bisa menguntungkan orang dalam (*insider information for insider trading*).

2.1.3.2 Prinsip-Prinsip Corporate Governance

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

menjelaskan empat prinsip dalam *corporate governance*, yaitu :

- a. *Fairness* (keadilan)

Fairness menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terwujudnya komitmen dengan para investor. Prinsip *fairness* ini diharapkan dapat membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan hati-hati (*prudent*) sehingga terdapat perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham secara *fair* (jujur dan adil). Pelaksanaan prinsip *fairness* membuat persyaratan tentang adanya peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten, efektif dan dapat ditegakkan secara baik.

b. *Transparency* (transparansi)

Transparency mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. Prinsip *transparency* diharapkan dapat membantu *stakeholders* dalam menilai risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan serta meminimalisasi adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam manajemen.

c. *Accountability* (akuntabilitas)

Prinsip *accountability* menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris. Apabila prinsip *accountability* diterapkan secara efektif, maka ada kejelasan fungsi, hak kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris, serta direksi.

d. *Responsibility* (pertanggungjawaban)

Responsibility memastikan akan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial. Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali menghasilkan eksternalitas (dampak luar kegiatan perusahaan) negatif yang harus ditanggung masyarakat.

Prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) kedalam lima aspek sebagai dasar

pedoman pengembangan kerangka kerja legal, institusional, dan *regulatory* bagi *corporate governance* di suatu negara. Lima aspek tersebut meliputi :

- a. Hak-hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan.

Hak-hak dari pemegang saham harus dilindungi dan difasilitasi

- b. Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham.

Seluruh pemegang saham yang terdapat di perusahaan baik pemegang saham minoritas maupun pemegang saham asing harus mendapatkan perlakuan yang setara dan diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh perhatian apabila hak-haknya dilanggar.

- c. Peranan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam *corporate governance*.

Hak-hak *stakeholders* harus diakui sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dan kerjasama aktif antara perusahaan dan para *stakeholders* harus dikembangkan agar dapat menciptakan kekayaan, pekerjaan, dan keberlangsungan dari perusahaan.

- d. Transparansi dan pengungkapan (*disclosure*).

Pengungkapan dilakukan secara tepat waktu dan akurat mengenai segala aspek material perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan *governance* perusahaan.

- e. Peran dan tanggung jawab dari pengurus perusahaan (*corporate boards*).

Pengawasan yang dilakukan oleh komisaris terhadap pengelolaan perusahaan oleh direksi harus berjalan dengan efektif, disertai dengan adanya tuntutan yang strategis terhadap manajemen perusahaan, serta

akuntabilitas dan loyalitas direksi dan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham.

2.1.3.3 Manfaat *Corporate Governance*

Nilai dari penerapan *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui pengawasan atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholders* dan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Selain itu, mekanisme *corporate governance* juga dapat membawa beberapa manfaat, antara lain :

- a. Mengurangi *agency cost*, yang merupakan biaya yang harus ditanggung pemegang saham karena penyalahgunaan wewenang (*wrong-doing*) sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
- b. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*) sebagai dampak dari menurunnya tingkat bunga atas dana dan sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan.
- c. Menciptakan dukungan para *stakeholders* dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.

2.1.3.4 Struktur *Corporate Governance*

Syakhroza (2003) menyatakan bahwa struktur *governance* merupakan suatu kerangka di dalam organisasi mengenai bagaimana prinsip *governance* bisa dibagi, dijalankan, dan dikendalikan. Struktur *governance* didesain sedemikian

rupa agar mampu mendukung jalannya aktivitas organisasi perusahaan secara bertanggung jawab dan terkendali.

Mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* dibagi dalam dua kelompok yaitu *internal* dan *external mechanisms*. *Internal mechanisms* adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris dan pertemuan dengan *board of director*. Sedangkan *external mechanisms* adalah cara untuk mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian oleh perusahaan dan pengendalian oleh pasar. Mekanisme atau struktur yang akan digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada mekanisme internal seperti yang disebutkan oleh Iskander & Chamlou (2000) dalam Lastanti (2005). Mekanisme tersebut akan dijelaskan dalam sub-sub bab berikut.

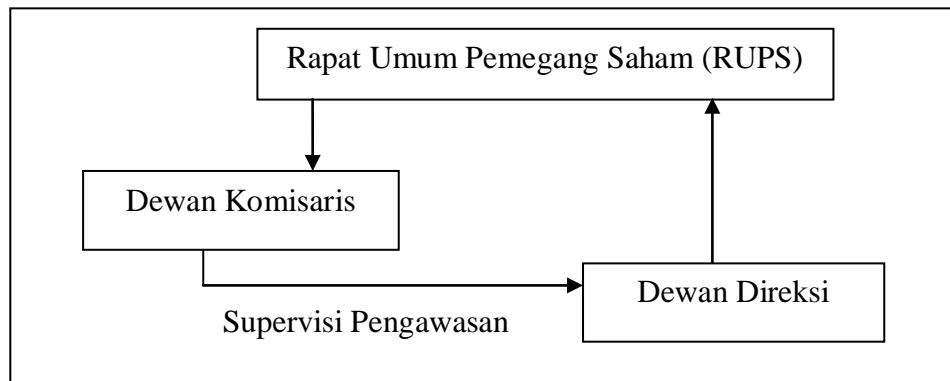
2.1.3.4.1 Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

Berkenaan dengan bentuk dewan dalam sebuah perusahaan, terdapat dua sistem yang berbeda yang berasal dari dua sistem hukum yang berbeda, yaitu *Anglo Saxon* dan *Kontinental Eropa*. Sistem Hukum *Anglo Saxon* mempunyai Sistem Satu Tingkat atau *One Tier System*. Di sini perusahaan hanya mempunyai satu dewan direksi yang pada umumnya merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (direktur eksekutif) dan direktur independen yang bekerja dengan prinsip paruh waktu (non direktur eksekutif). Pada dasarnya yang disebut belakangan ini diangkat karena kebijakannya, pengalamannya dan relasinya. Negara-negara dengan *One Tier System* misalnya Amerika Serikat dan Inggris.

Sistem Hukum *Kontinental Eropa* mempunyai Sistem Dua Tingkat atau *Two Tiers System*. Di sini perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi). Dewan direksi bertugas untuk mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengarahan dan pengawasan dewan komisaris. Dalam sistem ini, anggota dewan direksi diangkat dan setiap waktu dapat diganti oleh badan pengawas (dewan komisaris). Dewan komisaris tidak boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Anggota dewan komisaris diangkat dan diganti dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Negara-negara dengan *Two Tiers System* adalah Denmark, Jerman, Belanda, dan Jepang.

Karena sistem hukum Indonesia berasal dari sistem hukum Belanda, maka hukum perusahaan Indonesia menganut *Two Tiers System* untuk struktur dewan dalam perusahaan. Dewan komisaris dan dewan direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana yang dituang dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (*fiduciary responsibility*). Fungsi pengambilan kebijakan dijalankan oleh dewan direksi, sedangkan fungsi pengawasan dijalankan oleh dewan komisaris. Keduanya memiliki tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha bagi perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dewan komisaris dan direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan.

Gambar 2.1 Struktur Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam Two Tiers System yang diadopsi oleh Indonesia



(Sumber : *Forum for Corporate Governance in Indonesia*, 2000)

Keberadaan komisaris independen telah diatur melalui peraturan BEI tanggal 1 Juli 2000. Dinyatakan bahwa perusahaan yang terdaftar di bursa harus mempunyai komisaris independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham minoritas. Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah tiga puluh persen dari seluruh anggota dewan komisaris.

Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi pengawasan agar tercipta perusahaan yang memiliki *good corporate governance*. Komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris selain komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan anggota direksi dan dewan komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori

terafiliasi (KNKG, 2006). Kriteria komisaris independen menurut *Forum For Corporate Governance in Indonesia* (2000) antara lain :

1. Komisaris independen bukan merupakan anggota manajemen.
2. Komisaris independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas perusahaan.
3. Komisaris independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu.
4. Komisaris independen bukan merupakan penasehat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut.
5. Komisaris independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.
6. Komisaris independen tidak memiliki kontrak kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut.
7. Komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan yang dapat atau secara wajar dapat dianggap sebagai

campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan.

2.1.3.4.2 Komite Audit

Konsep komite audit mulai diperkenalkan kepada dunia usaha di Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Kemudian pada tahun 1970-an, *New York Stock Exchange* (NYSE) mulai mewajibkan keberadaan komite audit sebagai persyaratan pencatatan, sejak itu banyak negara yang membuat ketentuan mengenai komite audit. Sejalan dengan kecenderungan internasional tersebut, persyaratan semacam ini juga telah ditetapkan di Indonesia melalui Pedoman *Good Corporate Governance* yang diterbitkan pada bulan Mei 2002 (Toha, 2004).

Keberadaan komite audit diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor SE- 03/PM/2002 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002 (bagi BUMN). Komite Audit terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Menurut KNKG (2006), jumlah komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris untuk (1) meningkatkan kualitas laporan keuangan, (2) menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, (3)

meningkatkan efektifitas fungsi internal audit (SPI) maupun eksternal audit, serta (4) mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris atau pengawasan.

Tujuan dibentuknya komite audit meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

a. Penyusunan Laporan Keuangan

Meskipun direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab terutama atas penyusunan laporan keuangan dan auditor eksternal bertanggung jawab atau audit eksternal laporan keuangan, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan audit eksternal.

b. Manajemen Risiko dan Kontrol

Meskipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggung jawab atas manajemen risiko dan kontrol, komite audit memberikan pengawasan independen atas proses pengelolaan risiko dan kontrol.

c. *Corporate Governance*

Meskipun direksi dan dewan komisaris yang bertanggung jawab atas pelaksanaan *corporate governance*, namun komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses pelaksanaan *corporate governance*.

2.1.3.5 Eksternal Auditor

Eksternal auditor adalah profesi audit yang melakukan audit atas laporan keuangan dari perusahaan, pemerintah, individu atau organisasi lainnya. Eksternal auditor merupakan anggota kantor akuntan publik yang memberikan jasa klien. Profesi akuntan publik menghasilkan berbagai macam jasa bagi

masyarakat yang dapat digolongkan menjadi tiga kelompok : jasa *assurance*, jasa atestasi, dan jasa *nonassurance* (Mulyadi, 2002).

Eksternal auditor mempunyai independensi dari perusahaan yang diaudit. Pengguna dari informasi keuangan perusahaan, seperti investor, agen pemerintah dan umum bergantung pada eksternal auditor untuk menghasilkan informasi yang tidak bias dan independensi. Eksternal auditor berbeda dengan internal auditor : 1) tanggung jawab utama internal auditor adalah menilai strategi dan praktek manajemen risiko perusahaan, kerangka kerja pengendalian manajemen (termasuk teknologi informasinya), dan proses *governance*, 2) internal auditor tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan perusahaan. Peran utama eksternal auditor adalah untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Secara normal, eksternal auditor mereview prosedur pengendalian teknologi informasi saat menilai pengendalian internal keseluruhan.

2.1.4 Karakteristik Auditor

Seluruh perusahaan yang telah *Go Public* dan terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia diharuskan untuk memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebelum dipublikasikan kepada publik sesuai dengan keputusan ketua BAPEPAM No Kep. 17/PM/2002. Dalam menjalankan profesinya, auditor dituntut untuk bersikap independen dalam mendeteksi kemungkinan perilaku menyimpang atau

kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangannya.

Hal ini telah diatur melalui keputusan Menteri Keuangan no. 423/KMK-06/2002 yang mengatur mengenai rotasi wajib bagi auditor dan Kantor Akuntan Publik tidak diperbolehkan memberikan jasa nonaudit di samping jasa audit itu sendiri karena dapat mengganggu independensi auditor. Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang lebih besar diasumsikan audit yang dilakukan lebih berkualitas dibandingkan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang lebih kecil karena adanya kecenderungan untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan audit, termasuk menjalankan prosedur-prosedur audit yang baku.

Variabel *fee* audit diukur dengan menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh Supriyono (1988) dalam Fuad (2012) dengan empat pertanyaan mengenai *fee* audit yaitu :

1. Kantor Akuntan Publik (KAP) cenderung menerima klien dengan *fee* besar.
2. *Fee* audit yang besar akan meningkatkan tanggung jawab.
3. Kantor Akuntan Publik (KAP) akan mengaudit badan usaha dengan risiko tinggi apabila mendapatkan *fee* yang besar.
4. Besar kecilnya *fee* akan mempengaruhi tanggung jawab.

2.1.5 Ukuran Perusahaan

Menurut Machfoedz (1994) dalam Maria (2012) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan : total aktiva, log size, nilai

pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total asset perusahaan.

Ukuran perusahaan dinyatakan sebagai determinan dari struktur keuangan dalam hampir setiap studi dan untuk sejumlah alasan berbeda :

- 1 Ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal.
- 2 Ukuran perusahaan menentukan kekuatan tawar-menawar dalam kontrak keuangan.
- 3 Ada kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan *return* membuat perusahaan yang lebih besar dapat memperoleh lebih banyak laba.

Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran aktiva. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan yang memiliki total aktiva yang besar relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil.

2.1.6 Anak Perusahaan

Penelitian akan melihat seberapa besar hubungan keberadaan anak perusahaan dengan *fee* audit eksternal yang akan ditetapkan oleh KAP yang akan memeriksa laporan keuangan perusahaan *auditee*. Anak perusahaan mewakili

kompleksitas jasa audit yang diberikan yang merupakan ukuran rumit atau tidaknya transaksi yang dimiliki oleh klien Kantor Akuntan Publik untuk diaudit (Hay *et al.*, 2008 dalam Widiyari, 2009). Menurut Beams (2000), apabila perusahaan memiliki anak perusahaan di dalam negeri maka transaksi yang dimiliki klien semakin rumit karena perlu membuat laporan konsolidasi.

Kompleksitas terkait dengan kerumitan transaksi yang ada di perusahaan. Kompleksitas operasi klien merupakan variabel penting dalam menentukan besarnya *fee* audit sesuai dengan penelitian sebelumnya. Kompleksitas operasi perusahaan dapat menyebabkan biaya audit yang lebih tinggi karena pekerjaan audit yang dibutuhkan lebih banyak sehingga waktu yang diperlukan akan semakin banyak dan secara otomatis biaya yang lebih tinggi per jam akan dibebankan kepada klien (Cameran, 2005).

2.1.7 Fee Audit

Profesi akuntan publik mempunyai ciri yang berbeda dengan profesi lainnya seperti dokter atau pengacara. Profesi dokter maupun pengacara dalam menjalankan keahliannya akan menerima *fee* dari kliennya, dan mereka berpihak pada kliennya. Sedangkan profesi akuntan juga memperoleh *fee* dari kliennya dalam menjalankan keahliannya, tetapi akuntan harus independen, tidak memihak pada kliennya dan dalam melaporkan atau mendeteksi kecurangan harus bebas dari pengaruh *fee* yang diterima, karena memanfaatkan hasil pemeriksaannya terutama adalah pihak lain selain kliennya (Mulyadi, 1998 : 21). Oleh karena itu independensi dari akuntan dalam melaksanakan keahliannya merupakan hal yang

pokok, meskipun akuntan publik tersebut dibayar oleh kliennya atas jasa yang diberikan tersebut.

DeAngelo dalam Halim (2005) menyatakan bahwa *fee* audit merupakan pendapatan yang besarnya bervariasi karena tergantung dari beberapa faktor dalam penugasan audit seperti, ukuran perusahaan klien, kompleksitas jasa audit yang dihadapi auditor, risiko audit yang dihadapi auditor dari klien serta nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan jasa audit. Sedangkan menurut Sankaraguruswamy *et al.* (2003) *fee* audit merupakan pendapatan yang besarnya bervariasi tergantung dari beberapa faktor dalam penugasan audit seperti, keuangan klien (*financial of client*), ukuran perusahaan klien (*client size*), ukuran auditor atau KAP, keahlian yang dimiliki auditor tentang industri (*industry expertise*), serta efisiensi yang dimiliki auditor (*technological efficiency of auditors*).

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan Surat Keputusan No. KEP.024/IAPI/VII/2008 pada tanggal 2 Juli 2008 tentang Kebijakan Penentuan *Fee* Audit. Dalam bagian Lampiran 1 dijelaskan bahwa panduan ini dikeluarkan sebagai panduan bagi seluruh Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia yang menjalankan praktik sebagai akuntan publik dalam menetapkan besaran imbalan yang wajar atas jasa profesional yang diberikannya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam menetapkan imbalan jasa yang wajar sesuai dengan martabat profesi akuntan publik dan dalam jumlah yang pantas untuk dapat memberikan jasa sesuai dengan tuntutan standar profesional akuntan publik yang berlaku. Imbalan jasa yang terlalu rendah atau secara

signifikan jauh lebih rendah dari yang dikenakan oleh auditor atau akuntan pendahulu atau dianjurkan oleh auditor atau akuntan lain, akan menimbulkan keraguan mengenai kemampuan dan kompetensi anggota dalam menerapkan standar teknis dan standar profesional yang berlaku.

2.1.8 Penelitian Terdahulu

Harjinder *et al.* (2010) menguji pengaruh *Internal Audit* terhadap penentuan harga pelayanan audit (*fee audit*). Dengan sampel 300 perusahaan publik di Australia untuk tahun 2005, ditemukan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara *Internal Audit* dan *fee audit*. Tujuan dari penelitian Harjinder *et al.* (2010) adalah untuk menguji sifat dan tingkat hubungan antara fungsi audit internal perusahaan dan biaya audit eksternalnya (*fee audit*), dengan hanya menggunakan publik informasi.

Goodwin-Stewart dan Kent (2006) dalam “*Relation Beetwen External Audit Fees, Audit Committee Characteristics and Internal Audit*” menguji hubungan keberadaan komite audit, karakteristik komite audit dan fungsi audit internal terhadap kenaikan *fee audit* eksternal. Penelitian ini menggunakan sampel dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di *Australian Stock Exchange* (ASX) pada tahun 2000 dan menggunakan analisis OLS untuk menguji hipotesisnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit, pertemuan komite audit serta peningkatan fungsi audit internal berhubungan dengan kenaikan *fee audit*.

Yatim *et al.* (2006) dalam “*Governance Structures, Ethnicity and Audit Fees of Malaysian Listed Firms*” menguji pengaruh antara *fee* audit eksternal, dewan komisaris serta karakteristik komite audit. Dengan sampel 736 perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia pada tahun 2003, peneliti menemukan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara *fee* audit dan independensi dewan komisaris, komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang negatif antara *fee* audit dan perusahaan yang dimiliki oleh pribumi (bumiputera).

Willekens and Achmadi (2003) dalam “*Pricing and Supplier Concentration in the Private Client Segment of the Audit Market: Market Power or Competition?*” menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara keberadaan internal audit (IA) dalam perusahaan dengan *fee* audit eksternal yang dibayarkan. Hasil penelitian yang dilakukan Willekens and Achmadi (2003) menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *Internal Audit* dengan *fee* audit.

Carcello *et al.* (2000) dalam “*Board Characteristics and Audit Fees*” menguji pengaruh antara karakteristik dewan dalam perusahaan dengan *fee* yang dibayarkan untuk auditor eksternal. Penelitian ini menggunakan sampel dari *Fortune 1000 Companies* dan menggunakan analisis OLS untuk menguji hipotesisnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan positif antara *board independence, diligence and expertise* dan *fee* audit.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Metode Analisis	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Carcello <i>et al.</i> (2000)	Regresi OLS	Var. Independen : <i>Board Characteristic</i> Var. Dependen : <i>Fee Audit eksternal</i>	Terdapat pengaruh yang signifikan positif antara <i>board independence, diligence and expertise</i> dan <i>fee audit</i> .
2.	Willekens and Achmadi (2003)	Regresi	Var. Independen : Internal Audit Var. Dependen : <i>Fee Audit Eksternal</i>	<i>Internal Audit</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>fee audit</i> eksternal
3.	Yatim <i>et al.</i> (2006)	Regresi	Var. Independen : Struktur governance dan <i>Ethnicity</i> Var. Dependen : <i>Fee Audit Eksternal</i>	Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara <i>fee audit</i> dan independensi dewan komisaris, komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit. Terdapat pengaruh yang negatif antara <i>fee audit</i> dan perusahaan yang dimiliki oleh pribumi (bumiputera).
4.	Goodwin-Stewart dan Kent (2006)	Regresi OLS	Var. Independen : Karakteristik komite audit dan internal audit Var. Dependen : <i>Fee audit Eksternal</i>	Keberadaan komite audit, pertemuan komite audit serta peningkatan fungsi audit internal berpengaruh signifikan dengan kenaikan <i>fee audit</i> .
5.	Harjinder <i>et al.</i> (2010)	Regresi OLS	Var. Independen : Keberadaan Internal Audit Var. Dependen : <i>Fee Audit Eksternal</i>	Keberadaan <i>Internal Audit</i> signifikan dan berpengaruh positif terhadap <i>fee audit</i> eksternal

2.2 Posisi Penelitian

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Harjinder *et al.* (2010) yang menguji pengaruh *Internal Audit* terhadap penentuan harga pelayanan audit (*fee audit*). Dengan sampel 300 perusahaan publik di Australia untuk tahun 2005, ditemukan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara *Internal Audit* dan *fee audit*. Tujuan dari penelitian *et al.* (2010) adalah untuk menguji sifat dan tingkat hubungan antara fungsi audit internal perusahaan dan biaya audit eksternalnya (*fee audit*), dengan hanya menggunakan publik informasi.

Penelitian dari Harjinder *et al.* (2010) mengalami beberapa penambahan. Beberapa penambahan dalam penelitian ini yaitu penambahan variabel independen dari yang sebelumnya hanya *Internal Audit*, menjadi sepuluh variabel independen yang harus diuji apakah memiliki pengaruh terhadap penetapan *fee audit* eksternal. Alasan penambahan variabel independen lainnya karena menurut DeAngelo dalam Halim (2005) menyatakan bahwa *fee audit* merupakan pendapatan yang besarnya bervariasi karena tergantung dari beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya biaya audit tersebut seperti, ukuran perusahaan klien, kompleksitas jasa audit yang dihadapi auditor, risiko audit yang dihadapi auditor dari klien serta nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan jasa audit.

Penelitian ini masih didukung beberapa variabel kontrol tetapi sudah lebih berkurang dibanding penelitian sebelumnya. Variabel kontrol yang sebelumnya berjumlah empat belas dikurangi hingga tersisa tiga buah variabel kontrol. Beberapa variabel kontrol diubah menjadi variabel independen karena dirasa dapat mempengaruhi secara langsung terhadap penetapan *fee audit*.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Hubungan antara Pengendalian Internal dan *Fee Audit*

Pengendalian internal menjadi *concern* utama perusahaan terutama adanya *Sarbanes-Oxley Act* pada tahun 2002 (Buner dan Ribstein, 2006 dalam Widiyari, 2009). *Sarbanes-Oxley Act* (SOX) mendorong banyaknya perusahaan untuk lebih memperhatikan bidang *governance* termasuk peningkatan bagi *fee* audit untuk proses auditing dan pengendalian internal (Griffin *et al.* 2008). Peningkatan *fee* audit tersebut dapat dijelaskan sebagai peningkatan usaha dan risiko yang harus ditanggung oleh auditor sebagai konsekuensi dari adanya kewajiban tambahan yang disyaratkan oleh *Sarbanes-Oxley Act* (Dyck dalam Griffin *et al.* 2008).

Keberadaan fungsi audit internal merupakan bagian yang penting dari pengendalian internal perusahaan. Semakin besar waktu yang didedikasikan oleh fungsi internal audit selama periode audit laporan keuangan, semakin besar kontribusi yang diberikan oleh fungsi audit internal (Felix, 2001). Perusahaan dengan pengendalian internal yang lebih baik dalam bentuk keberadaan fungsi audit internal dan manajemen risiko akan mengurangi monitoring eksternal dari auditor yang akan berpengaruh pada penentuan *fee* audit.

2.3.2 Hubungan antara *Corporate Governance* dan *Fee Audit*

Struktur *corporate governance* dalam penelitian ini mencakup dewan komisaris dan komite audit. Dewan komisaris sebagai wakil dari pemegang saham, mempunyai kekuasaan yang kuat untuk mencegah dan mendeteksi perilaku oportunistik manajemen dalam pelaporan keuangan (Fama dan Jensen,

1983). Dengan demikian struktur *governance* yang baik cenderung akan mengurangi dan mengontrol risiko sehingga mengarah kepada *fee* audit yang rendah.

Sementara *The Blue Ribbon Committee* (1999) merekomendasikan bahwa komite audit yang *independent, diligent, expert* dan berjumlah banyak merupakan langkah yang baik untuk mengevaluasi pihak manajemen dan praktik pelaporan keuangan. Hal ini merupakan langkah untuk mendukung perbaikan lingkungan *governance* dan mengurangi *fee* audit eksternal.

2.3.3 Hubungan antara Karakteristik Auditor dan *Fee* Audit

Karakteristik auditor yang dinilai dengan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) apakah termasuk dalam KAP Big4 atau non-Big4. Dalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik per 1 Januari 2001 disebutkan bahwa: “KAP adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik.” Kantor akuntan publik yang memiliki nama besar (Big 4) dipandang sebagai auditor yang akan menghasilkan tingkat kualitas audit yang melebihi persyaratan minimal keprofesionalan dan kualitas dari Kantor Akuntan Publik yang tidak memiliki nama besar (Francis and Krishnan dalam Halim, 2005).

2.3.4 Hubungan antara Ukuran Perusahaan dan *Fee* Audit

Fee audit merupakan hal penting dalam pemeriksaan suatu laporan keuangan perusahaan. Banyak faktor yang mempengaruhi *fee* audit yang akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan

tersebut. Salah satu diantara faktor yang mempengaruhinya adalah ukuran perusahaan.

Ukuran Perusahaan (*Size*) adalah variabel yang paling penting dalam menentukan *fee* audit. Seperti dijelaskan pada penelitian sebelumnya, bahwa auditor yang melakukan audit di perusahaan besar akan menghabiskan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk meninjau operasi klien karena perusahaan besar terlibat dalam sejumlah besar transaksi yang tentu saja membutuhkan waktu berjam-jam bagi auditor untuk memeriksa. Hal tersebut yang mengakibatkan penetapan *fee* audit semakin tinggi.

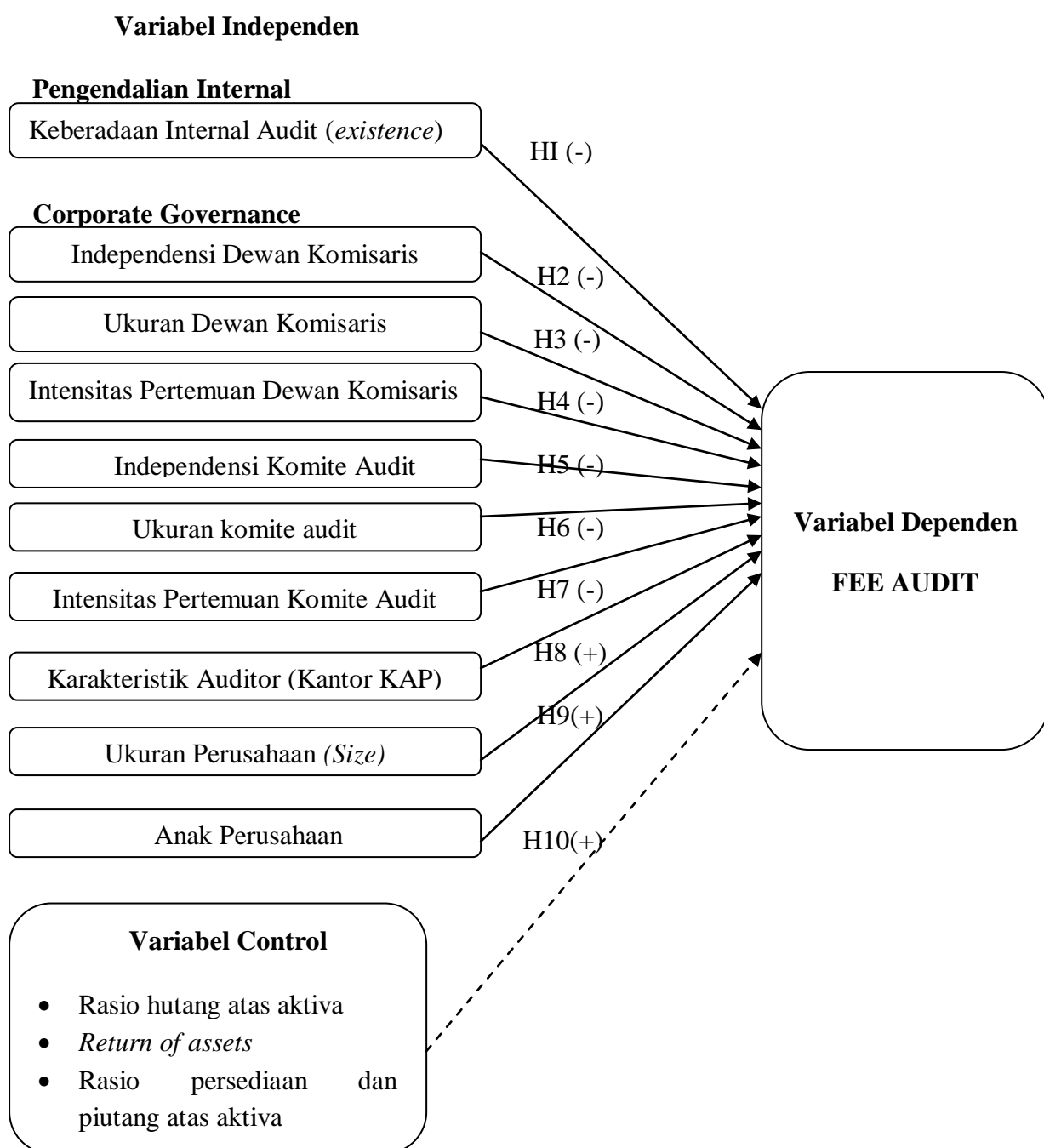
2.3.5 Hubungan antara Jumlah Anak Perusahaan dan *Fee* Audit

Penelitian ini menganalisis seberapa besar hubungan keberadaan anak perusahaan dengan *fee* audit yang akan ditetapkan oleh KAP yang memeriksa laporan keuangan perusahaan *auditee*. Penelitian ini juga ingin mengetahui seberapa besar hubungan keberadaan anak perusahaan yang terdapat dalam perusahaan dengan jumlah *fee* audit.

Anak perusahaan mewakili kompleksitas jasa audit yang diberikan yang merupakan ukuran rumit atau tidaknya transaksi yang dimiliki oleh klien Kantor Akuntan Publik untuk diaudit. Menurut Beams (2000), apabila perusahaan memiliki anak perusahaan di dalam negeri maka transaksi yang dimiliki klien semakin rumit karena perlu membuat laporan konsolidasi. Selain itu, apabila perusahaan memiliki anak perusahaan di luar negeri maka transaksi yang dimiliki klien semakin rumit.

Dalam penelitian ini digunakan tiga variabel kontrol yang berhubungan dengan *fee* audit antara lain rasio hutang atas aktiva, *return of assets*, dan rasio persediaan dan piutang atas aktiva perusahaan.

Gambar 2.2 Kerangka Penelitian



2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu proposisi atau anggapan yang mungkin benar dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau pemecahan masalah ataupun untuk dasar penelitian selanjutnya. Hipotesis berperan sebagai pedoman pelaksanaan penelitian dan membantu dalam pembuatan rancangan kesimpulan.

1. Internal Audit dan Audit Fee

Faktor paling sederhana bagi eksternal auditor untuk menguji laporan keuangan adalah dengan melihat adanya keberadaan fungsi internal audit dalam perusahaan (Felix, 2001). SAS No 65 mengindikasikan bahwa fungsi internal audit harus mempunyai kualitas dan kompetensi yang mencukupi agar auditor eksternal dapat mempertimbangkan kinerja audit internal untuk digunakan sebagai bukti yang kompeten bagi audit laporan keuangan. Dengan penerapan fungsi internal audit yang baik, dapat menghasilkan pelaporan keuangan yang semakin baik pula dan dapat mengurangi permasalahan keagenan yang akan muncul antara prinsipal dan agen. Serta diharapkan dapat membantu pelaksanaan proses audit yang dilakukan oleh auditor eksternal dan dapat mengurangi *fee* audit yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Penelitian Goodwin-Stewart dan Kent (2006) serta Harjinder *et al.* (2010) menguji pengaruh antara *Internal Audit* terhadap penentuan harga pelayanan audit (*fee* audit). Apabila suatu perusahaan memiliki fungsi internal audit dalam mekanisme operasionalnya, maka perusahaan tersebut akan rela

mengeluarkan *fee* audit yang lebih tinggi demi kualitas laporan keuangan yang dapat dipercaya. Namun, logikanya apabila perusahaan memiliki internal audit, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang semakin baik, sehingga penaksiran resiko yang dilakukan oleh auditor eksternal akan berkurang dan akan mengakibatkan *fee* audit eksternal yang semakin rendah. Maka dapat ditarik kesimpulan hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah :

H1 = Internal audit akan berpengaruh negatif terhadap *fee* audit eksternal.

2. Independensi Dewan Komisaris dan Audit Fee

Teori keagenan (*Agency Theory*) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika prinsipal mempekerjakan agen untuk memberikan jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Menurut teori ini hubungan antara pemilik dan manajer sulit tercipta. Karena adanya kepentingan yang saling bertentangan. Pertentangan antara principal dan agen akan menimbulkan masalah *asymetric information*. Selain masalah *asymetric information*, ketergantungan pihak eksternal pada angka akuntansi, serta kecenderungan manajer untuk mencari keuntungan sendiri, menyebabkan keinginan besar bagi manajer untuk memanipulasi kerja yang dilaporkan untuk kepentingan sendiri (Arifin, 2005).

Corporate governance secara khusus diimplementasikan melalui dewan komisaris dan dewan direksi. Komisaris independen yang terpisah dari pihak manajemen mempunyai tanggung jawab utama untuk mengawasi kinerja manajemen. Sebagai bagian utama dari pengendalian lingkungan, tanggung jawab

dewan komisaris juga meliputi pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan dan meningkatkan pengendalian yang berhubungan dengan risiko strategi kunci.

Dewan komisaris yang independen akan melakukan pengawasan yang lebih unggul sehingga reliabilitas dan validitas pelaporan keuangan yang lebih baik dapat dicapai (Beasley, 1996). Hal ini akan mengurangi penaksiran risiko yang dilakukan oleh auditor yang mengarah kepada *fee* audit yang lebih rendah. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H2 = Proporsi independensi dewan komisaris akan berpengaruh negatif terhadap *fee* audit eksternal.

3. Jumlah Dewan Komisaris dan Audit Fee

Teori keagenan (*Agency Theory*) menjelaskan hubungan agensi antara prinsipal dan agen. Menurut teori ini hubungan antara pemilik dan manajer sulit tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan. Pertentangan antara principal dan agen akan menimbulkan masalah yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. Untuk mengurangi masalah yang akan ditimbulkan dari pertentangan tersebut diperlukan penerapan *corporate governance* yang baik dalam perusahaan.

Salah satu bagian dari struktur *corporate governance* adalah jumlah anggota dewan komisaris. Jumlah dewan komisaris akan memiliki pengaruh dalam proses pelaporan keuangan. Apabila perusahaan memiliki jumlah dewan komisaris yang semakin banyak maka akan menghasilkan pelaporan keuangan yang semakin baik dan hal tersebut juga mempengaruhi proses audit. Laporan keuangan yang sudah baik membuat kerja dari auditor eksternal akan berkurang

dan mengakibatkan *fee* audit eksternal yang semakin kecil. Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H3 = Ukuran dewan komisaris akan berpengaruh negatif terhadap *fee* audit eksternal.

4. Intensitas Pertemuan Dewan Komisaris dan Audit Fee

Intensitas pertemuan dewan komisaris memiliki kontribusi dalam keefektifan fungsi pengawasan proses pelaporan keuangan. Dan dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris akan mengurangi kemungkinan terjadinya masalah keagenan yaitu pertentangan antara pihak pemilik (*principal*) dan pihak manajemen (*agent*). Penelitian Lipton *et al.* dan Byrne (1996) dalam Yatim *et al.* (2006) memberikan pendapat bahwa dewan komisaris yang sering bertemu akan melakukan kewajibannya dengan rajin dan tentunya bermanfaat bagi *shareholders*.

Conger *et al.* (1998) dan Vafeas (1999) dalam Yatim *et al.* (2006) berpendapat bahwa frekuensi pertemuan dewan komisaris dapat meningkatkan efektivitas dewan komisaris. Dewan komisaris yang rajin (diukur dengan jumlah rapat yang diadakan dan dilangsungkan selama tahun keuangan) akan berhubungan negatif dengan *fee* audit. Dengan intensitas pertemuan dewan komisaris yang lebih banyak diharapkan dapat mengurangi pekerjaan yang harus dilakukan oleh auditor eksternal karena pelaksanaan *corporate governance* yang sudah baik, sehingga dapat mengurangi besar *fee* audit.

Yatim *et al.* (2006) menyatakan bahwa dewan komisaris independen memiliki anggota yang lebih sedikit, dan sering melakukan rapat yang akan

menambah fungsi internal *governance* dan *environment control* serta mengurangi penilaian resiko oleh auditor terhadap proses pelaporan keuangan sehingga berpengaruh terhadap *fee* audit yang lebih rendah. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H4 = Intensitas pertemuan dewan komisaris akan berpengaruh negatif terhadap *fee* audit eksternal.

5. Independensi Komite Audit dan Fee Audit

The Blue Ribbon Committee (1999) merekomendasikan bahwa komite audit yang independen memiliki anggota yang lebih banyak, dan sering mengadakan dan melaksanakan rapat diharapkan akan meningkatkan pengawasan komite audit terhadap proses pelaporan keuangan. Dengan pelaksanaan *good corporate governance* yang baik maka akan mengurangi kemungkinan terjadinya masalah keagenan yang timbul antara prinsipal dan agen. Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah perusahaan yang memiliki komite audit sesuai dengan yang direkomendasikan oleh *The Blue Ribbon Company* akan dihubungkan dengan kualitas pelaporan keuangan yang tinggi, yang berakibat pada rendahnya penilaian auditor terhadap risiko pengendalian, sehingga *fee* audit yang rendah dapat tercapai.

Konsisten dengan pendekatan berbasis risiko untuk jasa audit (praktik tata kelola perusahaan yang baik akan menurunkan *fee* audit), suatu komite audit yang independen akan menghasilkan pengawasan yang lebih efektif terhadap proses pelaporan keuangan perusahaan sehingga dapat mengurangi timbulnya masalah dalam pelaporan keuangan. Dengan kualitas pelaporan keuangan yang

baik diharapkan dapat mengurangi beban pekerjaan yang harus dilakukan oleh auditor eksternal sehingga dapat mengurangi *fee* audit. (*Blue Ribbon Committee*, 1999).

Komite audit yang independen akan lebih baik dalam hal perlindungan reliabilitas proses akuntansi dan memajukan objektivitas dari komite audit. Hal itu akan memperkuat pengendalian internal dan mengarah kepada berkurangnya resiko pengendalian. Oleh karena itu, pengujian substantif dapat dikurangi sehingga diharapkan dapat memperkecil *fee* audit. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H5 = Independensi komite audit akan berpengaruh negatif terhadap *fee* audit eksternal.

6. Jumlah Komite Audit dan Audit Fee

Pandangan teori keagenan (*Agency Theory*) dimana terdapat pemisahan antara pihak prinsipal dengan pihak agen akan mengakibatkan munculnya potensi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Pihak manajemen yang mempunyai kepentingan tertentu akan cenderung menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan tujuannya bukan demi kepentingan prinsipal (Boediono, 2005).

Kondisi seperti ini diperlukan suatu sistem hak, proses, dan pengendalian yang dibentuk di dalam dan di luar manajemen dengan tujuan melindungi kepentingan stakeholder. Sistem ini disebut dengan *good corporate governance*

(GCG) dan salah satu komponen dari *good corporate governance* (GCG) ini adalah komite audit.

Braoitta (2000) dalam Yatim et al. (2006) menyatakan bahwa rekomendasi jumlah anggota komite audit konsisten dengan keinginan untuk meningkatkan status organisasi komite audit. Sesuai dengan rekomendasi dari *The Blue Ribbon Company* (1999), penelitian ini berpendapat bahwa jumlah komite audit yang lebih besar akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan yang berakibat pada rendahnya *fee* audit. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H6 = Ukuran komite audit akan berpengaruh negatif terhadap *fee* audit eksternal.

7. Intensitas Pertemuan Komite Audit dan Audit Fee

Berdasarkan teori keagenan (*Agency Theory*) yang menjelaskan bahwa ketika *principal* mempekerjakan *agent* untuk memberikan jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan maka hubungan agensi akan terbentuk. Menurut teori ini hubungan antara *principal* dan *agent* sulit terbentuk karena adanya kepentingan yang saling bertentangan. Pertentangan antara *principal* dan *agent* akan menimbulkan banyak masalah yaitu *asymmetric information*, ketergantungan pihak eksternal pada angka akuntansi, dan kecenderungan manajer untuk mencari keuntungan sendiri sehingga menyebabkan keinginan besar bagi manajer untuk memanipulasi kerja yang dilaporkan untuk kepentingan sendiri (Arifin, 2005).

Penelitian sebelumnya menyarankan bahwa komite audit yang lebih sering bertemu dapat mengurangi munculnya masalah pelaporan keuangan. Dengan melakukan pertemuan dan lebih sering berkomunikasi dengan auditor eksternal, komite audit dapat memperingatkan auditor tentang masalah tertentu yang membutuhkan perhatian lebih dari auditor (Abbott *et al.*, 2003). Konsisten dengan pendekatan berbasis resiko atas jasa audit maka komite audit yang lebih sering bertemu diharapkan akan mengurangi masalah pelaporan keuangan yang mengarah kepada *fee* audit eksternal yang lebih rendah.

Secara keseluruhan, struktur komite audit yang sesuai dengan rekomendasi *The Blue Ribbon Committee* (1999) akan memperkuat efektivitas komite audit dalam fungsi pengawasan. Hal ini akan mengarah kepada *fee* audit yang lebih rendah. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H7 = Intensitas pertemuan komite audit akan berpengaruh negatif terhadap *fee* audit eksternal.

8. Karakteristik Auditor dan Audit Fee

Seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diwajibkan untuk memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebelum dipublikasikan. Ukuran KAP tempat auditor bekerja dibedakan menjadi dua yaitu KAP Big Four dan KAP non-Big Four. Perusahaan yang menggunakan jasa dari kantor akuntan publik Big Four akan bekerja sama dengan auditor eksternalnya untuk mengaudit laporan keuangan. Dengan koordinasi dan komunikasi yang baik dari pihak internal maupun eksternal auditor akan mengurangi kemungkinan kesalahan dan

kecurangan yang akan dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Hal itu akan mengurangi masalah keagenan yang akan terjadi antara prinsipal dan agen.

Penelitian yang dilakukan Francis dan Krishnan dalam Halim (2005) menyatakan bahwa kantor akuntan publik (Big 4) dipandang sebagai auditor yang akan menghasilkan tingkat kualitas audit yang melebihi persyaratan minimal keprofesionalan daripada kualitas dari kantor akuntan publik yang tidak memiliki nama besar. Kantor akuntan publik yang termasuk dalam Big4 akan menghasilkan pelaporan keuangan yang berkualitas tinggi. Dan diharapkan membuat sedikit kesalahan sehingga memiliki *fee* audit yang lebih tinggi. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H8 = Keberadaan Kantor Akuntan Publik (Big4) akan berpengaruh positif terhadap *fee* audit eksternal.

9. Ukuran Perusahaan dan Audit Fee

Pada dasarnya ukuran dari perusahaan terbagi dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*) dan perusahaan kecil (*small firm*) (Machfoedz, 1994 dalam Maria, 2012). Penentuan ukuran perusahaan tersebut berdasarkan kepada total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Simunic (1996) mencoba memformulasikan faktor-faktor yang mempengaruhi *fee audit* dan menghasilkan suatu model yang menyatakan bahwa *fee* audit ditentukan oleh besar-kecilnya perusahaan yang diaudit (*client size*). *Client size* adalah faktor penentu yang paling penting dalam menentukan *fee* audit. Model inilah kemudian yang dijadikan acuan untuk melihat fenomena di seputar penawaran jasa audit.

Ukuran perusahaan yang besar dengan jumlah *asset* (kekayaan) yang tinggi membuat proses audit yang dilakukan oleh auditor eksternal akan semakin rumit. Hal tersebut akan mengakibatkan peningkatan besar *fee* audit yang dibebankan pada perusahaan. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H9 = Ukuran perusahaan akan berpengaruh positif terhadap *fee* audit eksternal.

10. Anak Perusahaan dan Audit Fee

Subsidiary atau disebut juga anak perusahaan atau lini induk perusahaan. Penelitian ini mengukur *subsidiary* berdasarkan ada tidaknya anak perusahaan yang dimiliki oleh induk perusahaan. Beams (2000), apabila perusahaan memiliki anak perusahaan di dalam negeri maka transaksi yang dimiliki klien semakin rumit karena perlu membuat laporan konsolidasi.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Gul, dkk (1998) dalam Halim (2005), menggunakan anak perusahaan dalam variabel penelitiannya terlihat hasil yang signifikan terhadap *fee* audit. Penelitian Hay *et al.* (2006) juga menyatakan terdapat hubungan yang positif signifikan antara anak perusahaan dengan besar penetapan *fee* audit eksternalnya. Semakin kompleks klien, semakin sulit untuk mengaudit dan akan membutuhkan waktu yang lebih lama pula. Hal tersebut berakibat pada *fee* audit yang semakin tinggi. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H10 = Adanya anak perusahaan akan berpengaruh positif terhadap *fee* audit eksternal

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *fee* audit. *Fee* audit merupakan jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap perusahaan untuk membiayai jasa auditor eksternal yang telah melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Data tentang *fee* audit diambil dari seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009-2011 yang benar-benar mengungkapkan besar jumlah *fee* audit, yang selanjutnya variabel akan diukur dengan menggunakan *logaritma natural* dari *audit fees*. Logaritma natural digunakan untuk memperkecil perbedaan angka yang terlalu jauh dari data yang telah didapatkan sebagai sampel penelitian.

Pengungkapan jumlah besar *fee* audit pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam laporan tahunan (*annual report*) masih sangat jarang. Belum tersedianya data tentang *fee* audit dikarenakan pengungkapan data tentang *fee* audit di Indonesia masih berupa *voluntary disclosures*, sehingga belum banyak perusahaan yang mencantumkan data tersebut di dalam laporan tahunan (*annual report*). Perusahaan yang mencantumkan data tentang *fee* audit biasanya didapatkan dalam bentuk paragraf. Selanjutnya variabel ini akan disimbolkan dengan AUFEE di dalam persamaan.

3.1.2 Variabel Independen

3.1.2.1 Internal Audit

Auditor eksternal dalam pelaksanaan tugas auditnya dapat dibantu oleh keberadaan *internal audit* dalam perusahaan (Felix, 2001). Biasanya alat pengukuran internal audit menggunakan faktor ada tidaknya fungsi tersebut. Namun, sejak Bapepam mengeluarkan peraturan Nomor IX.1.7 mengenai Unit Audit Internal dimana perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib memiliki unit audit internal sehingga alat pengukuran tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi.

Variabel *internal audit* pada penelitian ini diukur dengan menggunakan jumlah dari auditor internal yang terdapat dalam perusahaan. Selanjutnya variabel ini akan disimbolkan dengan IA di dalam persamaan.

3.1.2.2 Komisaris Independen

Informasi yang independen yang berasal dari auditor eksternal diperlukan oleh komisaris independen sehingga komisaris independen dapat melakukan pengawasan secara signifikan terhadap kegiatan dan pengendalian dalam perusahaan (Hay, 2008). Variabel akan dihitung dengan ketentuan bahwa dewan komisaris memiliki komisaris independen, memiliki anggota yang banyak, dan sering mengadakan rapat.

Komisaris independen diukur melalui proporsi komisaris independen yang didapatkan dari jumlah komisaris independen dibagi dengan jumlah total anggota dewan komisaris dan akan dilambangkan dengan $PERNEXBD$, jumlah

anggota dewan komisaris diukur melalui jumlah total anggota dewan komisaris yang bertugas untuk mengawasi dan memberikan nasihat pada direksi dalam perusahaan dan dilambangkan dengan PERBDFEX, dan jumlah intensitas pertemuan dewan komisaris diukur melalui jumlah total rapat yang dilakukan dewan komisaris selama periode akuntansi dan dilambangkan dengan BODMEET.

3.1.2.3 Komite Audit

Hay *et al.* (2008) dalam Widiyari (2009) menyatakan bahwa komite audit memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaporan keuangan dan dalam pelaksanaan pengendalian internal perusahaan serta sebagai penengah antara auditor internal dan eksternal. Variabel akan dihitung dengan ketentuan bahwa komite audit memiliki komisaris independen, memiliki anggota banyak, serta sering mengadakan rapat.

Komite audit yang independen diukur melalui proporsi jumlah total komisaris independen yang ada dalam komite audit dan dilambangkan dengan PERACIND, jumlah anggota komite audit diukur melalui jumlah total komite audit yang ada pada perusahaan dan dilambangkan dengan PERACFEX, dan jumlah intensitas pertemuan komite audit diukur melalui jumlah total rapat yang dilakukan komite audit selama periode akuntansi dan dilambangkan dengan ACMEET.

3.1.2.4 Karakteristik Auditor

Dalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik per 1 Januari 2001 disebutkan bahwa: “KAP adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang

memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik.” Dibandingkan Kantor Akuntan Publik yang tidak memiliki nama besar, kantor akuntan publik yang memiliki nama besar (Big 4) dipandang sebagai auditor yang akan menghasilkan tingkat kualitas audit yang melebihi persyaratan minimal keprofesionalan (Halim, 2005).

Perbedaan antara kantor akuntan publik atau auditor yang berkualitas tinggi dengan auditor yang berkualitas rendah adalah pada auditor yang berkualitas tinggi akan membuat sedikit kesalahan daripada auditor yang berkualitas rendah sehingga memiliki *fee* audit yang lebih tinggi dari auditor yang berkualitas rendah. (Halim, 2005). Kantor Akuntan Publik yang termasuk dalam The Big 4 adalah:

1. KAP Purwantono, Sarwoko, dan Sandjaja yang berafiliasi dengan Ernst and Young (E & Y).
2. KAP Haryanto Sahari, Tanudireja, Wibisana & Co. yang berafiliasi dengan Pricewaterhouse Coopers (PwC).
3. KAP Osman Bing Satrio & Co, yang berafiliasi dengan Deloitte Touche Thomatsu (DTT).
4. KAP Siddharta, Siddharta, dan Widjaja yang berafiliasi dengan Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG).

Variabel ini menggunakan skala nominal, yaitu angka 1 untuk mengindikasikan penggunaan Kantor Akuntan Publik Big 4 serta angka 0 untuk

mengindikasikan penggunaan Kantor Akuntan Publik non Big 4. Selanjutnya variabel ini akan dilambangkan dengan BIG4 dalam persamaan.

3.1.2.5 Ukuran Perusahaan

Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran total aktiva. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil.

Variabel indikator untuk mewakili faktor ukuran perusahaan adalah total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan (Hay *et al.*, 2008 dalam Widiyari, 2009). Variabel ini akan diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total aset perusahaan. Selanjutnya variabel ini akan dilambangkan dengan LNASET didalam persamaan.

3.1.2.6 Anak Perusahaan

Anak perusahaan mewakili kompleksitas jasa audit yang diberikan oleh auditor eksternal yang merupakan ukuran rumit atau tidaknya transaksi yang dimiliki oleh klien Kantor Akuntan Publik untuk diaudit. Semakin banyak jumlah anak perusahaan yang dimiliki sebuah perusahaan maka akan semakin rumit transaksi yang dimiliki klien Kantor Akuntan Publik (Hay *et al.* 2008 dalam Widiyari, 2009). Apabila perusahaan memiliki anak perusahaan yang terdapat di dalam negeri, maka transaksi yang dimiliki klien semakin rumit karena perlu membuat laporan konsolidasi (Halim, 2005).

Variabel anak perusahaan akan diukur dengan menggunakan skala nominal. Perusahaan yang memiliki anak perusahaan akan diberikan nilai 1, sementara perusahaan yang tidak memiliki anak perusahaan akan diberikan nilai 0. Selanjutnya variabel ini akan dilambangkan dengan SUBSIDRS dalam persamaan.

3.1.3 Variabel Kontrol

Penggunaan variabel kontrol dalam penelitian ini berfungsi sebagai pengontrol variabel independen untuk dapat menjelaskan keberadaan variabel dependen, serta untuk mengembangkan *baseline model* atau model dasar bagi *fee audit* sebagaimana yang digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Dasar keputusan penggunaan variabel kontrol adalah untuk menghindari adanya unsur bias hasil penelitian. Sehingga hasil penelitian dengan menggunakan variabel kontrol akan meminimalisasi bias dibandingkan dengan penelitian tanpa menggunakan variabel kontrol. Variabel-variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

3.1.3.1 Rasio Utang atas Aset Perusahaan

Variabel rasio utang atas aset perusahaan merupakan rasio untuk mengukur likuiditas seluruh utang-utang jangka panjang perusahaan atas seluruh aset perusahaan. Selanjutnya variabel ini akan disimbolkan dengan LEV dalam persamaan.

Rumus :

$$LEV = \frac{\text{Utang Jangka Panjang}}{\text{Total Aset}}$$

Pengertian :

- Utang jangka panjang merupakan utang jangka panjang perusahaan yang dapat dilunasi beberapa waktu (tahun) lagi.
- Total aset merupakan total seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan, baik aset lancar, aset tetap, aset tidak berwujud.

3.1.3.2 *Return of Assets*

Variabel *Return of Assets* (ROA) merupakan ukuran efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perusahaan dengan ROA tinggi akan membayar *fee* yang lebih rendah dengan tetap konsisten dengan *auditor client risk sharing* (Crasswell dan Francis dalam Halim, 2005). Variabel *Return of Assets* (ROA) adalah salah satu komponen untuk menghitung risiko audit dalam model *fee* audit (Simunic, 1980 dalam Harjinder, 2010). Selanjutnya variabel akan dilambangkan dengan ROA dalam persamaan.

Rumus :

$$ROA = \frac{\text{Pendapatan operasional setelah pajak}}{\text{total aset}}$$

Pengertian :

- Pendapatan merupakan laba usaha perusahaan yang diperoleh dari transaksi utama perusahaan.
- Total aset merupakan total seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan, baik aset lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud.

3.1.3.3 Rasio Persediaan dan Piutang atas Aset Perusahaan

Beberapa aset tertentu dipandang lebih beresiko ketika diaudit dan menyebabkan *fee* audit yang lebih tinggi. Persediaan dan piutang merupakan akun yang lebih sulit diaudit daripada akun yang lain (Simunic, 1980 dalam Harjinder 2010). Selanjutnya variabel ini akan dilambangkan dengan INVREC dalam persamaan.

Rumus :

$$INVREC = \frac{Persediaan + Piutang}{Total Aset}$$

Pengertian :

- Persediaan merupakan seluruh barang persediaan yang dimiliki oleh perusahaan.
- Piutang merupakan seluruh piutang yang dimiliki perusahaan.
- Total aset merupakan total seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan, baik aset lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009-2011. Periode 3 tahun dipilih karena merupakan data terbaru yang bisa diperoleh dan diharapkan dengan periode waktu 3 tahun akan diperoleh hasil yang baik dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi *fee* audit eksternal. Seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dipilih karena diharapkan dengan populasi yang cukup banyak dapat memperoleh sampel yang memadai untuk penelitian ini.

Metode sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* (dipilih berdasarkan kriteria tertentu dari pertimbangan peneliti) dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang *representative* sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria tersebut ditentukan sebagai berikut :

1. Saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2009-2011.
2. Perusahaan telah *listing* di BEI paling lambat tanggal 31 Desember 2009 dan tidak mengalami *delisting* selama periode pengamatan.
3. Perusahaan menyertakan laporan tahunan beserta laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen.
4. Perusahaan yang benar-benar mengungkapkan besar *fee* audit pada laporan tahunan baik yang mengungkapkannya dalam rupiah maupun dollar. Apabila perusahaan mengungkapkan besar *fee* audit dalam dollar maka akan dikalikan dengan kurs dollar pada tahun yang bersangkutan.
5. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2009-2011 yang memiliki anak perusahaan akan diberikan nilai 1. Sedangkan perusahaan yang tidak memiliki anak perusahaan akan tetap dimasukkan dalam sampel penelitian dan akan diberikan nilai 0.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini didasarkan pada alasan : (1) mudah didapat, (2) biayanya lebih murah, (3) penggunaan laporan keuangan yang didalamnya telah

diaudit oleh akuntan publik sehingga data terpercaya keabsahannya. Data diperoleh dari *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) dan JSX Watch serta dilengkapi data yang berasal dari laporan perusahaan yang dipublikasikan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan mempelajari data-data yang diperoleh dari sumber data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan pencatatan dan penghitungan. Data-data ini diperoleh dari Pojok BEI Undip, ICMD, website Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan berbagai macam literatur yang ada.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif didasarkan pada data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis. Analisis ini digunakan untuk memberikan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian yaitu audit internal, struktur *corporate governance*, karakteristik auditor, ukuran perusahaan, anak perusahaan, dan *fee* audit yang dapat dilihat dari jumlah data, angka rata-rata (*mean*), kisaran (*median*), dan standar deviasi.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi antara variabel dependen dengan variabel independen mempunyai distribusi

normal atau tidak. Proses uji normalitas data dilakukan dengan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) yaitu jika nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* tidak signifikan, maka semua data yang ada terdistribusi secara normal. Namun bila nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* signifikan, maka semua data yang ada tidak terdistribusi secara normal. Uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dilakukan dengan melihat angka probabilitasnya dengan ketentuan (Ghozali, 2011) :

1. Nilai signifikansi atau nilai probabilitass $< 0,05$ maka distribusi dikatakan tidak normal.
2. Nilai signifikansi atau nilai probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dikatakan normal.

Selain uji K-S, dapat juga diperhatikan penyebaran data (titik) pada *normal p-plot of regression standardized residual* dari variabel dependen, dimana :

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel independen saling berhubungan secara linier. Multikolonieritas terjadi apabila antara variabel-variabel independen terdapat hubungan yang signifikan. Untuk mendeteksi adanya masalah multikolonieritas adalah dengan memperhatikan :

1. Besaran korelasi antar variabel independen

Pedoman suatu model regresi bebas multikolonieritas, memiliki kriteria sebagai berikut :

- a) Koefisien korelasi antara variabel-variabel independen harus lemah, tidak lebih dari 90 persen atau dibawah 0,90 (Ghozali, 2011).
 - b) Jika korelasi kuat antara variabel-variabel independen dengan variabel-variabel independen lainnya (umumnya diatas 0,90), maka hal ini menunjukkan terjadinya multikolonieritas yang serius (Ghozali, 2011).
2. Nilai Tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*) yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi.

Persamaan yang digunakan adalah :

$$VIP = \frac{1}{Tolerance}$$

Nilai *cutoff* yang digunakan dan dipakai untuk menandai adanya faktor-faktor multikolonieritas adalah nilai *tolerance* < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10. Model regresi yang baik tidak terdapat masalah multikolonieritas atau adanya hubungan korelasi diantara variabelvariabel independennya.

c. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah terjadinya varians yang tidak sama untuk variabel independen yang berbeda. Heterokedastisitas dapat terdeteksi dengan melihat plot antara nilai taksiran dengan residual. Untuk melihat heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatter plot*. Yang mendasari dalam pengambilan keputusan ini adalah:

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk satu pola yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka akan terjadi masalah heterokedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu-sumbu maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji heterokedastisitas dapat diperkuat dengan menggunakan uji *glejser*.

Uji *Glejser* adalah meregresikan antara variabel bebas dengan variabel *residual absolute*, dimana apabila nilai $p > 0,05$ maka variabel bersangkutan dinyatakan bebas heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dimaksudkan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Apabila terjadi korelasi, maka diperkirakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul disebabkan adanya observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi yang lainnya.

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, maka dilakukan pengujian *Run Test*. *Run Test* bertujuan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. *Run Test* digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis).

3.6 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis Regresi Berganda (*Multiple Regression*) dengan alasan bahwa variabel independennya lebih dari satu. Analisis ini digunakan untuk menentukan hubungan antara *fee* audit dengan variabel-variabel independen (Ghozali, 2011). Persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{AUFEE} &= b_0 + b_1 (\text{LEV}) + b_2 (\text{ROA}) + b_3 (\text{INVREC}) + b_4 (\text{IA}) + b_5 \\ &(\text{PERNEXBD}) + b_6 (\text{PERBDFEX}) + b_7 (\text{BODMEET}) + b_8 \\ &(\text{PERACIND}) + b_9 (\text{PERACFEX}) + b_{10} (\text{ACMEET}) + b_{11} (\text{BIG4}) \\ &+ b_{12} (\text{LNASSET}) + b_{13} (\text{SUBSIDRS}) + e \end{aligned}$$

Dimana :

AUFEE	= <i>fee</i> audit yang dikeluarkan
LEV	= rasio hutang atas aktiva perusahaan
ROA	= <i>return of asset</i>
INVREC	= rasio persediaan dan piutang atas aktiva perusahaan
IA	= pengendalian Audit Internal
PERNEXBD	= proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris
PERBDFEX	= jumlah total anggota dewan komisaris
BODMEET	= jumlah pertemuan dewan komisaris per tahun buku
PERACIND	= jumlah komisaris independen dalam komite audit
PERACFEX	= jumlah total anggota komite audit

ACMEET	= jumlah pertemuan komite audit per tahun buku
BIG4	= auditor Big 4
LNASSETS	= logaritma natural dari total aktiva
SUBSIDRS	= keberadaan anak perusahaan

Kemudian untuk mengetahui pengaruh antara variabel-variabel independen dengan tingkat *fee* audit maka dilakukan pengujian-pengujian hipotesis penelitian terhadap variabel-variabel dengan pengujian dibawah ini :

a. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan ikhtisar yang menyatakan seberapa baik garis regresi sampel mencocokkan data. Koefisien determinasi untuk mengukur proporsi variasi dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh regresi. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1, apabila $R^2=0$ berarti tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, sedangkan jika $R^2=1$ berarti suatu hubungan yang sempurna. Untuk regresi dengan variabel bebas lebih dari 2 maka digunakan *adjusted* R^2 sebagai koefisien determinasi.

b. Uji F

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah variabel-variabel independen terhadap variabel dependen memiliki pengaruh secara bersama-sama. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penolakan atau penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan 0,05 maka hipotesis diterima yang berarti secara bersama-sama variabel LEV, ROA, INVREC,

IA, PERNEXBD, PERBDFEX, BODMEET, PERACIND, PERACFEX, ACMEET, BIG4, LNASSET, SUBSIDRS berpengaruh terhadap *fee* audit.

2. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak yang berarti secara bersama-sama variabel LEV, ROA, INVREC, IA, PERNEXBD, PERBDFEX, BODMEET, PERACIND, PERACFEX, ACMEET, BIG4, LNASSET, SUBSIDRS tidak berpengaruh terhadap *fee* audit.

c. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel independen secara individu (*partial*) dalam menjelaskan perilaku variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penolakan atau penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikansi kurang atau sama dengan 0,05 maka hipotesis diterima yang berarti secara *partial* variabel ukuran LEV, ROA, INVREC, IA, PERNEXBD, PERBDFEX, BODMEET, PERACIND, PERACFEX, ACMEET, BIG4, LNASSET, SUBSIDRS berpengaruh terhadap *fee* audit.
2. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak yang berarti secara *partial* variabel ukuran LEV, ROA, INVREC, IA, PERNEXBD, PERBDFEX, BODMEET, PERACIND, PERACFEX, ACMEET, BIG4, LNASSET, SUBSIDRS tidak berpengaruh terhadap *fee* audit.